

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Sebagai suatu proses, pembangunan tentu saja dilakukan dengan melihat berbagai aspek kebutuhan yang ada sekaligus merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan berbagai tuntutan pergeseran waktu akibat berkembangnya peradaban, sistem sosial masyarakat, dan teknologi yang lebih maju.

Pada awalnya pembangunan merupakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah dan negara, masyarakat dianggap pasif dan kurang berkontribusi dalam menjadi objek pembangunan. Belakangan ini, pandangan baru tentang pembangunan berkembang, tidak lagi hanya memberikan beban kepada pihak pemerintah, melainkan mulai mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak ketiga seperti dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui realisasi belanja daerah oleh pemerintah, upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi serta

jumlah penduduk miskin. Melalui peningkatan keempat indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Adapun kualitas manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Mulyadi(2003) menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang,

Menurut Ginting(2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari angka IPM. Arif(2012) dalam penelitiannya menyatakan IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi

dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas).

IPM disusun dari komponen pembangunan manusia yang dianggap menjadi dasar yaitu ketahanan hidup atau usia, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pendidikan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa dan angka rata-rata lama sekolah, kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang domestik di masing - masing negara (BPS, 2012).

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. *United Nations Development Program* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu IPM untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan, dan indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat

Provinsi Kalimantan Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk yang kurang stabil setiap tahunnya. Namun sebenarnya memiliki potensi sumber daya manusia yang siap untuk diberdayakan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan

pembangunan daerah secara lebih mandiri. Berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai..

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun masih belum stabil sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi jumlah penduduk miskin, dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Hal tersebut terjadi karena upah minimum regional yang di terima tenaga kerja berdasarkan penetapan dari pemerintah masih terbilang belum dapat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Dengan demikian pembangunan manusia akhirnya menjadikan target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi kebijakan didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian ini, maka permasalahan yang akan di lihat dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi, serta upah minimum regional dan realisasi belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat ?

Dan adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi, serta upah minimum regional dan realisasi belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat sebagai alat pembangunan.

Tabel 1.1
Data Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2014 (Persen)

Kab/Kota	2012	2013	2014
Sambas	61,53	62,47	63,28
Bengkayang	63,42	63,99	64,40
Landak	62,38	62,72	63,59
Mempawah	60,75	62,09	62,78
Sanggau	61,39	61,72	62,06
Ketapang	62,04	62,85	63,27
Sintang	61,66	62,64	63,19
Kapuas Hulu	61,85	62,63	62,90
Sekadau	60,14	61,02	61,98
Melawi	61,58	62,27	62,89
Kayong Utara	57,53	57,92	58,52
Kubu Raya	63,42	63,94	64,52
Kota Pontianak	75,55	75,98	76,63
Kota Singkawang	68,54	69,13	69,84

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 1.1 selama periode 2012-2014 nilai IPM per kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan indikasi yang baik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di

Provinsi Kalimantan Barat. Pada Kabupaten Kayong Utara memang mengalami peningkatan tapi di bandingkan dengan kabupaten atau kota lain masih tertinggal. Hal ini disebabkan oleh Kabupaten Kayong Utara baru saja mekar dan di resmikan pada tanggal 2 januari 2007.

A.1. Realisasi Belanja daerah

Wujud nyata dari pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam UU No.17 Tahun 2003 merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah dan sudah disetujui oleh DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga menjadi alat pengawasan terhadap pengeluaran dan pendapatan daerah di tahun berikutnya. APBD terdiri dari beberapa komponen yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan lain-lain Pendapatan yang sah (LPS).

Belanja daerah merupakan Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan menurut UUNo. 33 Tahun 2004. Berdasarkan fungsinya Belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi :

1) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

2) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung juga merupakan anggaran yang diberikan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya untuk pembangunan dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya

Berikut ini adalah data realisasi belanja daerah pemerintah per kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 1.2
Data realisasi belanja daerah perKabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2014 (Rupiah)

Kab/Kota	2012	2013	2014
Sambas	814.295.338	1.039.619.502	1.174.144.328
Bengkayang	541.669.729	620.299.719	806.042.638
Landak	334.114.498	827.393.255	920.954.103
Mempawah	589.639.052	656.670.843	758.034.430
Sanggau	882.436.460	989.383.319	1.053.233.782
Ketapang	1.202.764.205	1.202.764.205	1.577.793.986
Sintang	920.004.348	1.075.556.247	1.141.361.438
Kapuas Hulu	925.799.594	1.046.895.750	1.166.456.511
Sekadau	442.410.729	583.077.949	617.842.293
Melawi	690.995.266	659.061.044	793.523.572
Kayong Utara	444.748.360	506.115.482	507.628.306
Kubu Raya	805.466.698	948.342.809	1.034.435.210
Kota Pontianak	1.006.492.631	1.309.158.772	1.326.351.109
Kota Singkawang	515.601.489	681.703.042	684.828.674

sumber : BPSProvinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 selama periode 2012-2014 nilai belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Pada periode 2012-2014 tercatat bahwa setiap kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi yang baik dalam mensejahterakan masyarakatnya.

A.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk (Jhingan, 2007). Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di dalam suatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode survey tertentu.

Menurut (Todaro dan Smith, 2006) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

a) Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dimasa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar

Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi perkabupaten/kota oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2012-2014.

Tabel 1.3
Data Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2014 (persen)

kota/kab	2012	2013	2014
Sambas	5,90	6,17	5,40
Bengkayang	5,87	5,90	4,02
Landak	5,42	5,20	4,93
Mempawah	4,06	5,44	6,00
Sanggau	6,03	5,98	3,26
Ketapang	4,65	4,72	2,76
Sintang	5,60	6,47	5,36
Kapuas Hulu	4,75	5,23	3,98
Sekadau	6,21	6,52	6,09
Melawi	6,22	4,85	4,73
Kayong Utara	5,78	5,25	5,65
Kubu Raya	6,61	6,49	6,37
Kota Pontianak	7,77	7,83	5,94
Kota Singkawang	6,64	6,60	6,61

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Dari tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2014 berkaca dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2013 kecuali Kota Singkawang yang mengalami peningkatan sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya.

A.3. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jadi jumlah penduduk miskin adalah setiap penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2012) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty treshold*)

Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara.

World Bank(2004) menyatakan bahwa salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Menurut (Adisasmita, 2005) indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu,

harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan.

Tabel 1.4
Data Jumlah Penduduk Miskin perkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2014 (ribu jiwa)

kota/kabupaten	2012	2013	2014
Sambas	45.310	51.200	49.300
Bengkayang	15.200	18.400	16.900
Landak	42.570	49.500	48.500
Mempawah	13.710	15.600	15.000
Sanggau	18.720	20.400	19.700
Ketapang	53.460	58.800	54.200
Sintang	32.490	39.000	35.700
Kapuas Hulu	23.160	26.400	24.300
Sekadau	11.140	13.200	12.100
Melawi	22.560	26.000	24.000
Kayong Utara	10.170	11.100	9.900
Kubu Raya	32.760	32.100	29.500
Kota Pontianak	33.410	32.800	30.900
Kota Singkawang	10.410	13.000	12.000

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Dari tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ketapang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dibanding kota/kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari tahun 2012-2014.

A.4. Upah Minimum Regional

Upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja, pegawai ataupun buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Kemudian

UMR sudah diatur juga melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.07/Men/2013 tentang Upah Minimum

Indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai hidup dari buruh/karyawan/tenaga kerja. Pentingnya pemberian upah kepada tenaga kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaannya serta besarnya kebutuhan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha. Upah yang sesuai tersebut dapat diberikan baik itu sesuai dengan jam kerja ataupun banyaknya unit barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut (Charysa,2013).

Kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga perlu penetapan Upah Minimum Regional (UMR) yang mengacu kepada pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum (KHL). Pemerintah menetapkan upah berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada beberapa kabupaten/kota yang terletak di Kalimantan Barat juga menganut penetapan UMR berdasarkan KHL masing-masing. Penetapan upah di Kalimantan Barat didasarkan pada nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) dan pelaksanaannya upah ditetapkan melalui Dewan Pengupahan yang didalamnya terdapat perwakilan dari serikat pekerja dan perwakilan pengusaha.

Tabel 1.5
Data Upah Minimum Regional per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2014 (rupiah)

KABUPATEN/KOTA	UMR 2012	UMR 2013	UMR 2014
Kota Pontianak	995.000	1.165.000	1.425.000
Kabupaten Mempawah	910.000	1.143.000	1.387.000
Kabupaten Landak	940.000	1.125.000	1.450.000
Kabupaten Sintang	950.000	1.126.000	1.450.000
Kabupaten Sambas	945.000	1.122.500	1.450.000
Kabupaten Ketapang	1.050.000	1.500.000	1.650.000
Kabupaten Kapuas Hulu	986.500	1.260.000	1.475.000
Kota Singkawang	925.000	1.135.000	1.450.000
Kabupaten Sanggau	925.000	1.118.000	1.449.000
Kabupaten Kubu Raya	945.000	1.166.000	1.390.000
Kabupaten Sekadau	910.000	1.180.000	1.450.000
Kabupaten Bengkayang	975.500	1.255.000	1.400.000
Kabupaten Melawi	900.000	1.180.000	1.470.000
Kabupaten Kayong Utara	900.000	1.060.000	1.600.000

Sumber : BPSProvinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 1.5 selama periode 2012-2014 UMR di Provinsi Kalimantan Barat per kabupaten kota terus mengalami peningkatan namun masih terbilang kecil berkaca dari ini masih perlunya peningkatan UMR di tiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat agar menjamin kesejahteraan hidup seluruh warga yang ada di provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin dan upah minimum regional per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan judul :

**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pembangunan yang dilakukan per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal untuk mendorong tingginya Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan ekonomi selama periode 2012-2014 setiap tahunnya berfluktuasi. Diperlukan kontribusi pemerintah daerah yang maksimal dari Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat mendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang dapat mendorong indeks pembangunan manusia daerah seperti realisasi belanja daerah, upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006).

Pengeluaran pemerintah diduga juga dapat mempengaruhi perkembangan kualitas dari sumber daya manusia tersebut, khususnya di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia didaerahnya

baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan, sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan turut serta meningkat

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Barat?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Barat?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Barat?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
4. Menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap kontribusi belanja daerah, upah, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Kalimantan barat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan dalam perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan model penelitian

Analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dependen serta variabel independen dalam model penelitian. Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga yaitu pengaruh variabel belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin dan upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia antar wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 8. Analisis panel data merupakan metode analisis dengan menggabungkan data panel dengan data antar individu (*cross section*). penelitian ini menggunakan

asumsi adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh tiap daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, intersep bervariasi antar unit tapi tidak berbeda dalam tiap panel, Dimana:

$$\mathbf{IPM}_t = \beta_0 + \beta_1\mathbf{RBD}_t + \beta_2\mathbf{PE}_t + \beta_3\mathbf{JPM}_t + \beta_4\mathbf{UMR}_t + \varepsilon_t$$

Dimana :

\mathbf{IPM}_t = Indeks Pembangunan Manusia (persen)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

\mathbf{PE} = Pertumbuhan Ekonomi (persen)

\mathbf{RBD} = Belanja Daerah (rupiah)

\mathbf{JPM} = Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

\mathbf{UMR} = Upah Minimum Regional (rupiah)

ε_t = Error Term

Sumber : Novita dewi. pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau.. JOM Fekon, Vol.4

No.1(Februari) 2017 di modifikasi

E.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari data cross section yaitu 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan data time series dengan rentang waktu 3 tahun dari tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data *pooling* atau panel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat dan DISNAKER Provinsi Kalimantan Barat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah pemilihan judul penelitian yaitu pengaruh belanja daerah, upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yang didukung dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel-variabel penelitian, penjelasan mengenai jenis dan sumber data, dan metode analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang hal- hal yang berkaitan dengan deskripsi objek penelitian, analisis data serta intepretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini bab terakhir yang berisi kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saransaran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN